

Tajuk Rencana *Kedaulatan Rakyat*

Citra Yoga Terusik

DUNIA pendidikan dan citra Yoga kembali terusik menyusul peristiwa biadab yang menimpa seorang siswi kelas II SMA Budi Luhur Yogyakarta, Laras (18), warga Sendangtirto Berbah Sleman. Ia disepak dan disiksa para pelaku sesama perempuan dan kebanyakan berusia sebaya dengan korban di sebuah kos Dusun Saman Bangunharjo Sewon Bantul, beberapa waktu lalu. Gara-garanya sepele, yakni Laras mengunggah foto tato Hello Kitty dalam *display picture* (DP) BlackBerry-nya.

Benarkah hanya gara-gara tato Hello Kitty para perempuan penyekep Laras sampai berbuat keji, menentang, memukul, menyundut rokok, menggunduli dan, maaf, memasukin botol minuman ke dalam kemaluan korban? Inikah potret remaja putri kita yang hidup di kota pelajar? Tentu ini sangat kasuistis dan tak bisa digeneralisasi. Mudah-mudahan ini peristiwa terakhir yang mengguncang dunia pendidikan di Yogyakarta.

Kita menempatkan kasus ini dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya sekedar peristiwa pelajar menganiaya pelajar, melainkan ada persoalan serius di balik itu semua. Pertama, kita harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang dijalankan selama ini. Jangan-jangan selama ini kita telah lupa atau mengabaikan pelajaran agama dan budi pekerti kepada anak didik kita, sehingga menghasilkan manusia yang tidak berbudi.

Kedua, kita tak boleh menutup mata bahwa geng pelajar, terutama para siswi, masih eksis. Kita sangat yakin, penganiayaan Laras yang berjumlah sepuluh orang itu punya ikatan yang sangat kuat, sehingga bisa melakukan perbuatan keji secara bersama-sama, tanpa rasa takut dan bersalah. Ikatan semacam itu hanya ada pada geng, yang memang sering bikin onar di masyarakat.

Ketiga, penindakan hukum, ini terkait dengan sejauh mana aparat penegak hukum menangani kasus-kasus kekerasan terhadap pelajar dengan pelaku pelajar pula. Untuk persoalan yang pertama, tentu lebih ber-

tumpu pada tanggung jawab guru, orangtua, pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat. Mereka harus duduk bersama guna memikirkan cara yang paling efektif untuk memberi pemahaman kepada siswa tentang pentingnya nilai-nilai moral, kemandirian, dan budi pekerti. Sedangkan persoalan kedua dan ketiga, lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum yang didukung pihak sekolah serta masyarakat.

Harus diakui, selama ini kita sangat "permisif" terhadap perilaku pelajar. Bahwa pelajar masih dalam fase pencarian jati diri, belum stabil, perlu pembinaan bukan penghukuman, selalu menjadi dalih untuk mentolerir perbuatan mereka. Padahal, sangat jelas bahwa mereka adalah anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Selama ini sanksi yang diterapkan terhadap mereka yang bermasalah dengan hukum (melakukan tindak pidana), cenderung sangat ringan, bahkan tidak menimbulkan efek jera.

Memang, dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, tak selalu berujung pada penjara. Dalam beberapa putusan pengadilan, anak yang bermasalah dengan hukum bisa dilepaskan dari tanggung jawab pidana, misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau diserahkan kepada lembaga sosial untuk dibina. Namun, hakim juga berwenang untuk menghukum mereka dengan ketentuan pidana maksimal sepele dari ancaman orang dewasa.

Terhadap kasus yang menimpa Laras, kita mendorong aparat penegak hukum terus melanjutkan penanganan kasus hingga ke pengadilan. Kita berharap tidak ada tindakan diversi atau menyimpang dari prosedur hukum formal, meski semua demi kebaikan anak. Toh, kita juga telah memiliki lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus anak yang representatif seperti di Kutoarjo. Jadi, para penyekep dan penganiaya Laras tetap harus dihukum. Di Lapas khusus anak itulah mereka nanti mendapat pembinaan yang memadai agar tak mengulangi perbuatannya. □ - c.

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Pendaftaran BPJS Tulip RS Dr Sardjito

SAAT ini pendaftaran pasien BPJS Tulip RS Dr Sardjito kurang nyaman. Berkas-berkas pasien ditumpuk di lantai di depan pintu BPJS Tulip mulai pukul 24.00-07.30. Kemudian pukul 07.30 petugas BPJS datang, berkas tumpukan di balik lala dibawa ke dalam kantor, diproses.

Saya usul sebaiknya pendaftaran tersebut diubah, disamakan dengan pendaftaran di laboratorium. Pasien ambil nomor dengan mesin (ada tanggal, jam, nomor). Pasien dipanggil nomornya dan menyerahkan berkas-berkasnya.

Sistem ini sudah berjalan bagus sekali, kemungkinan berkas hilang, ter-

cecer dan lain-lain tidak ada, aman, tertib dan berkeadilan tidak ada kekurangan.

Mesin dihidupkan mulai pukul 24.00 malam sampai dengan pukul 12.00. Setiap hari pasien atau keluarganya yang mengambil nomor boleh pulang dulu. Pukul 07.30 siap di kantor BPJS Tulip membawa berkas-berkas dan menunggu panggilan. Cara ini akan bagus sekali.

Terima kasih BPJS, terima kasih RS Dr Sardjito semoga pelayanan makin baik. □ - c.

Sutiyo

Krapyak RT 05 RW 17 Sidoarum.

Berjuang Demi Keberadaan Madrasah

SALAM hormat dari Madrasah Ibtidaiyah Doga, Desa Nglangeran, Patuk, Gunungkidul. Kami para guru beserta komite madrasah berjuang demi madrasah yang ada di desa kami tetap bertahan keberadaannya. Kami bukan PNS sehingga tidak bergaji besar sebagaimana para guru PNS. Motivasi kami adalah bagaimana anak-anak di desa kami mengenal agamanya sejak dini. Salah satunya adalah pengajaran dan pendidikan model madrasah. Kami meyakini bahwa pengenalan dan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan sejak anak usia dini akan memberi faedah yang besar bagi dirinya, orangtua, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih dari itu, dua keuntungan yakni dunia akhirat.

Lewat media ini, kami tidak bermaksud meminta gaji untuk diri kami, izinkan kami mengajak bapak/ibu/sahabat pemerhati yang peduli dan dermawan dengan rela hati berkenan membantu perjuangan kami, ikut ser-

ta mencerdaskan bangsa melalui madrasah yang kami kelola dengan keyakinan bahwa keikutsertaan bapak/ibu dan para sahabat dalam perjuangan ini madrasah akan menjadi lebih baik dari hari ini.

Facilitas yang ada sekarang sangat kurang. Kami memerlukan tambahan ruang kelas baru, pagar halaman, buku-buku perpustakaan, komputer, mebel yang lebih banyak dan alat-alat penunjang lainnya.

Sekiranya bapak/ibu/sahabat meragukan hal ini, kami sangat berharap atas kunjungannya sehingga melihat dengan nyata kondisi madrasah kami yang berada di kaki gunung api purba Desa Nglangeran, Patuk, Gunungkidul. Kepada LAZIS Universitas Islam Indonesia diucapkan terima kasih telah berkenan membantu kami dalam program 'Galang Madrasah'. □ - c.

Aris Duwiyantoro SAg
Guru MI Doga Nglangeran
08564334940.

Gerakan Massal Pemberantasan Sarang Nyamuk

DI masa pancaroba, gigitan nyamuk aedes aegypti semakin menjadi-jadi. Berbagai macam cara sering dilakukan untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti, di antaranya dengan cara menabur abate di bak-bak mandi, kebersihan lingkungan dan fogging (pengasapan), dan penerapan 3M yaitu menguras, menutup dan mengubur. Menguras bak mandi, mengubur barang-barang bekas yang dapat di-

pakai sebagai tempat sarang nyamuk dan menutup rapat-rapat tempat penyimpanan air.

Penulis yakin, apabila tiap-tiap dusun/pendukuhan se-kecamatan dilaksanakan gerakan massal pemberantasan sarang nyamuk (PSN), hasilnya tentu akan lebih baik lagi. Selamat mencoba. □ - c.

Kunaini

Dukuh Krapyak Kulon
Panggunharjo, Sewon, Bantul.

Pembatalan UU SDA

DI TENGAH hiruk pikuk penegakan hukum, telah terjadi peristiwa besar yang menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) pada Rabu (18/2). Keputusan tersebut ditunjukkan dalam Amar Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.

Keputusan ini menggabungkan permohonan judicial review dari beberapa lembaga dan perorangan. Pihak pemohon antara lain PP Muhammadiyah, Al Jama'iyatul Washliyah, SOJU-PEK, Perkumpulan Vana Prastha, Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Berlakunya keputusan ini berarti landasan pengelolaan SDA kembali ke UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Pertimbangan dan Pengaruh

Majelis mempertimbangkan bahwa air adalah hakikat khalayak ramai. Hal ini sebagai tafsir konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (1). Pengusahaan air harus ada pembatasan yang ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Majelis berpendapat juga bahwa hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka priotas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Hak Guna Usaha Air menurut majelis tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Pengusahaan air untuk negara lain juga tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kesehatan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain.

Hak penguasaan oleh negara atas air mestinya menjadi 'ruah' atau 'jantung' dari UU SDA

Ribut Lupiyanto

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pemerintah telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan UU SDA *a quo*. Namun menurut MK semua PP tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Penyelewengan norma berdampak dalam pelaksanaannya yang cenderung membuka peluang privatisasi dan komersialisasi yang merugikan masyarakat. Atas pertimbangan ini, MK membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Und



ang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Pembatalan ini memiliki pengaruh positif bagi keadilan dan keberlanjutan SDA. Pihak swasta tidak lagi leluasa untuk menguasai bisnis air. Chandranegara (2015) mengungkapkan putusan MK ini telah membuktikan bahwa konstitusi masih berpihak pada kepentingan umum bukan pengkotak-kotak hak atas air.

Langkah Penyikapan

Pembatalan UU SDA ini menunjukkan kelemahan dan keterlambatan pemerintah selaku pe-

MEA, Daya Saing dan Penelitian

TAHUN ini Indonesia memasuki tahapan baru dalam hubungan ekonomi regional seiring dengan penerapan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagi Indonesia, MEA merupakan peluang untuk membuktikan kapasitas ekonomi sebagai *leader* di kawasan strategis ini. MEA juga diharapkan tidak saja memperbesar kue ekonominya Indonesia, tapi juga pemerataan manfaatnya bagi rakyat secara keseluruhan.

Pemerataan menjadi penting. Meski Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terbesar ASEAN saat ini, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan masih relatif kalah dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Sebagai ilustrasi, penduduk Malaysia dan Thailand dapat dengan mudah menggunakan moda transportasi umum yang cepat dan nyaman dalam wujud kereta api atau monorel yang bagi masyarakat perkotaan Indonesia masih sebatas ada, belum berkualitas sepadan.

Karenanya meningkatkan daya saing menjadi kata kunci dalam upaya memaksimalkan keterlibatan Indonesia dalam MEA. Tujuannya tentu saja adalah agar jangan sampai MEA menjadikan penduduk Indonesia sebatas penonton di pinggir lapangan ekonomi kawasan. Salah satu faktor penting dalam mendukung daya saing ini adalah penelitian dan pengembangan atau *research and development* (R & D).

Penelitian dan pengembangan berkualitas menjadi urgen mengingat dari keduanya lah ide-ide baru nan cemerlang dapat digagas dan diwujudkan menjadi solusi atas beragam persoalan. Namun sayangnya pada sisi penelitian terutama yang berkualitas internasional, Indonesia justru tidak sekokoh ekonominya, jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Daya Saing

Dari data yang dikompilasi *Scimago Journal Ranking* misalnya, perbandingan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal atau seminar terindeks Scopus antara sejumlah negara ASEAN menunjukkan masih lemahnya daya saing peneliti Indonesia. Scopus sendiri merupakan database karya ilmiah bereputasi internasional

Yuli Adriansyah

yang merupakan salah satu rujukan dunia akademik.

Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, jumlah publikasi Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam cenderung berada pada level yang sama, dengan Singapura tampil sebagai pemimpin. Perubahan mulai terlihat ketika pada pertengahan 2000-an, Singapura, Thailand, dan Malaysia mengalami peningkatan publikasi sedangkan Indonesia dan Vietnam cenderung stagnan. Malaysia kemudian muncul sebagai kekuatan baru ketika mulai tahun 2008 mengalahkan Thailand dan akhirnya pada tahun 2010 mengalahkan Singapura, yang selama ini menjadi kontributor publikasi utama. Setelahnya Malaysia benar-benar tidak terkejar.

Sampai dengan 2013, terdapat 23.190 judul artikel terindeks Scopus hasil karya Malaysia dan pada saat yang sama Singapura dan Thailand menyumbang masing-masing 17.052 dan 11.313 judul. Indonesia pada tahun yang sama memproduksi 4.175 atau unggul tipis dibandingkan Vietnam yang menghasilkan 3.443. Indonesia dengan demikian baru mampu menghasilkan sekitar seperlima dibandingkan Malaysia, serta sepertempat dan setengah dari Singapura dan Thailand.

Mengapa Indonesia sedemikian tertinggal dibandingkan negara tetangga? Salah satu alasan yang sering digunakan adalah kurangnya sinergi kelembagaan untuk mengakomodasi sumber daya berkualitas. Anak didik kita banyak sekali yang memenangi aneka olimpiade keilmuan di berbagai negara. Namun hal ini tidak menjamin bahwa kemudian mereka akan kuliah dan mengembangkan ilmunya di Indonesia. Seringkali karena berbagai alasan mereka memilih kuliah dan bahkan menetap di negara-negara maju atau bahkan

nyusun serta DPR yang melakukan persetujuan. Pemerintahan Jokowi mesti menyikapi secara optimal pascakeputusan MK ini. Beberapa langkah penyikapan penting dilakukan dalam waktu dekat.

Pertama, pemerintah penting berkoordinasi melalui kementerian terkait, yaitu Kementerian PU dan Permukiman, Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan lainnya. Kajian yang penting segera dirumuskan menyangkut konsekuensi atas pembatalan UU SDA ini. Hal yang utama terkait perizinan atau MoU dengan swasta atau luar negeri terkait pengelolaan air. Selain itu juga kebijakan sementara terkait pengelolaan SDA mutakhir dengan pedoman UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Kedua, pemerintah penting segera menyiapkan draft UU SDA yang baru. UU No 11 Tahun 1974 sudah terlalu tua dibandingkan dengan kondisi dan kebutuhan yang semakin kompleks. Penyusunan draft sebaiknya diamanahkan kepada Kementerian LH dan Kehutanan. Tujuannya agar ruh konservasi dan keadilan pelayanan sesuai amanat konstitusi dapat lebih mendapatkan jaminan. Jika tidak hati-hati dan mengikuti konstitusi, maka draft baru sangat mungkin bernasib sama dengan UU SDA yang dibatalkan saat ini.

Ketiga, pihak pemerhati lingkungan dapat memberikan kontribusi langkah pasca-pembatalan ini. Kontribusi tersebut terkait usulan pengelolaan dalam masa darurat ini, konsekuensi perizinan, penyusunan draft UU baru, dan konsekuensi lainnya.

Pembatalan UU SDA ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR agar menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti norma konstitusi. Eksploitasi berorientasi ekonomi tidak boleh meminggirkan aspek keadilan dan konservasi lingkungan. Indonesia adalah negeri makmur air yang mestinya dapat diakses murah seluruh rakyat. □ - c.

Ribut Lupiyanto, Peneliti Pusat Studi Lingkungan UII; Deputi Direktur C-PublicCA (Center for Public Capacity Acceleration)

sejumlah negara tetangga.

Larinya sumber daya manusia berkualitas ke luar negeri ini menyebabkan potensi dalam negeri berkurang. Seberapa wajar jika talenta terbaik kita sering memilih negara lain karena di sana memang fasilitas yang memadai dan pendapatan yang berlipat menjadi jaminan. Sebagai gambaran, High Impact Research (HIR) di Universitas Malaya Malaysia mendapat dana hingga sekitar Rp 2 Triliun lebih untuk penelitian unggulannya. Sesuatu yang sulit dibayangkan akan diperoleh di Indonesia.

Karenanya, pemerintah baru yang saat ini telah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam satu kementerian, memiliki momentum untuk mengejar penelitian ini. Tujuannya tidak lain agar kualitas manusia Indonesia makin meningkat sehingga memiliki daya saing dalam menggarung pasar bebas ASEAN. Jangan sampai selama MEA berlangsung bangsa kita masih saja mengandalkan TKI sebagai sumber devisa sedangkan bangsa lain mengimpor ahli untuk menjadi narasumber di negara kita. □ - c.

***) Yuli Adriansyah, Dosen Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.**

Pojok KR

Australia kaitkan bantuan tsunami dengan narkoba.

- **Ternyata ada maunya.**

KPK-Polri perlu bersinergi, tak ada lagi kriminalisasi.

- **Mestinya sejak dulu.**

Keistimewaan DIY, masih banyak PR'.

- **Tapi tak semua orang bisa mengerjakan.**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat
SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) **Pensihats:** Drs HM Idham Samawi.
Komisaris Utama: Drs HM Romli. **Direktur Utama:** dr Gun Nugroho Samawi.
Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Umum: HM Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS

Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Drs Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Mussyahada, Primaswolo Sudjono SPS, Joko Budhiarto. **Manajer Litbang Diklat Redaksi:** Wisnoko Poesno, **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wajid. **Redaktur:** Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Hariyono Hadi, Dra Hj Fadmi Suswati, Dra Prabandari, Isnanaw, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Athiati, MN Hassan, Harry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulisty Sutopo, Drs Haslo Sutardi, Eko Boediartoro, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, M Sobrih, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Isdiyanto SIP (Pjs Ka Biro Semarang). H Imong Dewanto (Pjs Ka Biro Jakarta), Gomarul Hadi (Ka Biro Surakarta), Edhi Romadhon (Ka Biro Purwokerto), Drs M Thoha (Ka Biro Kedu Utara), Gunawan (Ka Biro Kedu Selatan), R Agusutata (Ka Sub Biro Kulonprogo), Sri Wastiti (Ka Sub Biro KlATEN & Boyolali), Yagus Waluyo (Ka Sub Biro Gunungkidul), Sukaryono BA (Pjs Waka Biro Semarang). **Fotografer:** Effy Widjono Putro. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, telp (0274) 565685 (Hunting) Agung Susilo SE, telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr@yahoo.com, iklankr.k13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ..Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 sd S1, Permikahan, Ulang Tahun) • Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Keping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%.

Bank: Bank BNI - Rek. Giro: 003.044.0854, Bank Bukopin - Rek. No. 1000.103.04.3, Dinas Giro dan Cekpos No.15.78
Dietak di Percetakan "Kedaulatan Rakyat" Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Kantor Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id>
Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B Jakarta Timur 13120, telp (021) 8563602, fax: 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. **Wakil Kepala Perwakilan Hariyadi Tata Rahaerja: Wartawan:** H Ihsan Zubaedi Raqib, Syaifillah Hadimar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, H Margono Herwoto, Rini Suryati, Ida Lumongza Ritonga. **Kedu Utara:** Jalan Achmad Yani No 133, telp (0293) 363552 dan 362502 Magelang. **Kepala Perwakilan Sunmarysah. Surakarta:** Jalan Bhayangkara No.13 (lama no. 42) telp dan fax (0271) 718015, Surakarta 57141. **Kepala Perwakilan Dra Hermin Lestari, Semarang:** Jalan Lampersari No. 62, telp (024) 8315792, 8448622. Pjs Kepala Perwakilan Sutardi. **Purwokerto:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, telp (0281) 622244, Fax (0281) 621797. **Kepala Perwakilan Ach. Pujiyanto Spd. Kedu Selatan:** Jalan Veteran Blok A Kav. 6 Purworejo Plaza, telp/fax (0275) 921848. **Kepala Perwakilan Suprpto Spd. Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, telp 774738 Kepala Sub Perwakilan Suyatno, **Klaten & Boyolali:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3 Bendogantungan Klaten, telp (0272) 322756. **Kepala Perwakilan Drs Guno Indarjo. Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, telp 393562, 394707Kepala Sub Perwakilan Grahito. **Homepage:** www.kr.co.id.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.